KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Dana Peremajaan Sawit Naik Dua Kali Lipat - DPR : Sangat Positif Bagi Petani
Tanggal : Jumat, 01 Maret 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Dana Peremajaan Sawit Naik Dua Kali Lipat

DPR: Sangat Positif Bagi Petani

Senayan menyambut baik rencana Pemerintah menaikkan dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk para petani dari Rp 30 juta menjadi Rp 60 juta per hektare.

ANGGOTA Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengatakan, peningkatan dana PSR ini sangat positif bagi para petani.

"Memang sudah pernah disampaikan berkali-kali bahwa dengan dana Rp 30 juta (per hektare per tahun) kemarin itu jauh daripada cukup," kata dia saat dihubungi Rakyat Merdeka, Kamis (29/2/2024).

Firman yakin, dasar penetapan menaikkan dana PSR ini tentu sudah melalui kajian dan perhitungan yang matang. Kenaikan ini sudah dirasionalisasi dengan kenaikan harga bahan, upah tenaga kerja, dan berdasarkan asumsi nilai kurs dollar terkini dan aspek-aspek lainnya.

"Nah, harapan kami dengan kenaikan ini supaya petani sawit bisa memaksimalkan, bisa mengoptimalkan," pesan politisi Partai Golkar ini.

Dia bilang, yang penting sekarang bagaimana teknis pelaksanaannya di lapangan. Apakah penyalurannya melalui kelompok tani atau melalui kooperasi. Sistem pendistribusian dana PSR ini juga harus dikontrol seefektif mungkin agar betul-betul tepat sasaran. Jangan sampai penyalurannya nanti disalahgunakan.

"Karena dana (PSR) ini jumlahnya cukup besar, sehingga pelaksanaan di lapangan ini harus betul-betul menjadi concern kita bersama. Dan bagaimana kontrolnya ketika nanti ada pelaksanaan di lapangan itu. Karena kalau kita sudah bicara uang, waduh, itu berisiko tinggi," wantinya.

Firman merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Bahwa, dana sawit untuk PSR ini berasal dari dana sawit yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Firman Soebagyo

Firman mempersilakan Pemerintah mengatur penyaluran karena ini sudah menyangkut masalah teknis ini.

"Kami hanya memberikan *warning* karena ini menyangkut dana yang cukup besar, maka harus hati-hati pengelolaannya. Kalau melalui kooperasi, melalui kelompok (tani) harus hati-hati, jangan sampai ada penyalahgunaan terhadap dana itu yang agak tidak sesuai dengan tujuan," pesannya.

Dia bilang, kunci sukses dana PSR ini sangat tergantung kepada pelaksanaannya. Sebab, tak sedikit, program yang baik menjadi tidak optimal lantaran kurangnya kontrol di lapangan. Contohnya, Program Wajib Tanam Bawang Putih bagi para importir untuk memperoleh kuota impor.

Temuan di lapangan, justru banyak importir enggan menanam bawang putih, sehingga lebih memilih untuk menyalurkan uang tunai kepada petani.

"Nah ketika kelompok taninya itu diserahkan uang, ya kelompok taninya tidak serius, kemudian uangnya dimakan duluan. Itu sering terjadi, makanya harus hati-hati," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Pemerintah akan menaikkan dua kali lipat dana program PSR untuk para petani rakyat menjadi Rp 60 juta per hektare per tahun , dari sebelumnya, sebesar Rp 30 juta.

"Anggaran dinaikkan menjadi Rp 60 juta per hektare sesuai kajian akademis dan juga komunikasi langsung dengan para petani sawit," kata Airlangga.

Para petani yang mendapatkan bantuan program peremajaan sawit merasa kesulitan bila bantuan hanya Rp 30 juta per tahun. Biaya itu hanya cukup digunakan untuk operasional selama setahun saja. Sedangkan sawit baru bisa dipanen hasilnya selama 4 tahun.

"Jadi, kalau dananya hanya Rp 30 juta itu hanya cukup untuk mereka hidup di tahun pertama. Beli bibit dan hidup di tahun pertama saja," ucap Airlangga.

Diharapkan dengan penambahan dana bantuan ini, petani bisa mendapatkan tambahan biaya hidup. Termasuk untuk modal melakukan penanaman komoditas sela sambil menunggu hasil sawit. ■ KAL